

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) adalah seorang wanita dewasa berusia 18-59 tahun dengan status menikah, belum menikah, bercerai atau janda yang ditinggal suami tanpa kejelasan, dan menjadi pencari nafkah utama keluarga yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena faktor kemiskinannya, keterbelakangan dan kebodohnya mengalami gangguan fungsional dalam kehidupan sosial dan ekonominya sehingga yang bersangkutan mengalami kesulitan untuk menjalankan peranan sosial.

Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) kebanyakan berasal dari keluarga yang kurang mampu dan seringkali mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat sekitarnya. Mereka tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan hak yang sama karena diskriminasi dari orang lain, dan faktor-faktor lain seperti SARA(suku agama ras antar golongan).

Dinas Sosial merupakan sebuah lembaga yang memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah serta menanggulangi angka kemiskinan, melaksanakan pemberdayaan dan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Selain itu Dinas Sosial juga melaksanakan peran sebagai pelaksana daerah dibidang sosial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan berupaya untuk mengatasi permasalahan sosial dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Sukabumi.

Dalam pelaksanaannya Dinas Sosial telah melakukan usaha usaha untuk menanggulangi angka Penyandang Masalah Sosial Ekonomi terutama masalah WRSE di Kota Sukabumi melalui serangkaian usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum wanita penyandang kemiskinan. kegiatan tersebut salah satunya ialah melakukan pemberian motivasi dan memberikan pelatihan keterampilan usaha.

Kemiskinan merupakan permasalahan kesejahteraan sosial dimana ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan, dan papan serta pendidikan dan kesehatan. Ketidakmampuan ini disebabkan pendapatan yang rendah. Untuk itu, pendapatan menjadi indikator kemiskinan. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai sebuah kondisi yang dialami penduduk ketika mereka hidup dalam kondisi serba kekurangan yang mengakibatkan mereka tidak mampu mencapai drajat hidup yang layak. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan dimensi sosial dan ekonomi namun juga berkaitan dengan dimensi budaya, politik dan hankam. Karena tidak dapat dipungkiri terjadinya konflik sosial antar kelompok, perdagangan perempuan, eksploitasi anak, migrasi secara illegal, dan anarkisme dilatar belakang oleh kemiskinan sebagai penyebab utamanya. Dan kurangnya peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat juga menjadi salah satu faktor makin meningkatkan kemiskinan disuatu daerah. Maka dari itu pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah yang sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat mengambil keputusan dan menentukan suatu tindakan serta memberikan pengetahuan dan

keahlian masyarakat dalam mengelola usaha dengan harapan dapat mengurangi kemiskinan.

Pemberdayaan merupakan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai proses menyiapkan masyarakat dengan berbagai sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat didalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan pencapaian kesejahteraan sosial serta memiliki kemampuan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

Kesejahteraan sosial adalah bagian dari cita-cita kemerdekaan Indonesia dan merupakan tujuan pembangunan negara. Oleh karena itu UUD 1945 mengamanatkan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah. Dalam upaya pengentasan kemiskinan Dinas Sosial mengelompokkan penduduk yang menjadi target pengentasan kemiskinan, yaitu kelompok penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan,

keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Tabel 1.1
Data PMKS di Kota Sukabumi tahun 2017

NO	KODE	JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	KECAMATAN							JUMLAH
			GUNUNG PUYUH	BAROS	CIBEUREM	CIKOLE	CITAMIANG	WARUDOYONG	LEMBUR SITU	
1	A1	Anak Terlantar	23	19	53	82	39	72	57	345
2	A2	Anak yang berhadapan dengan hukum	1	2	12	22	2	8	2	49
3	A3	Anak Balita Terlantar	3	1	36	30	1	2	11	84
4	A4	Anak Jalanan	1	1	1	30	4	8	4	49
5	A5	Lanjut Usia terlantar	16	14	18	26	15	9	5	103
6	A6	Pengemis	15	3	7	4	11	7	1	48
7	A7	Gelandangan	1	-	4	1	-	4	3	13
8	A8	Korban Penyalahgunaan NAPZA	3	1	1	11	-	8	1	25
9	A9	Tuna susila	-	-	3	1	-	-	5	9
10	A10	Bekas warga binaan LP	18	1	6	16	4	10	15	70
11	A11	Penyandang Disabilitas	54	34	70	59	98	99	16	430
12	A12	Anak dengan kedisabilitasn (ADK)	16	13	19	37	31	17	30	163
13	A13	Fakir Miskin	10,057	9,694	12,564	13,778	12,591	18,465	10,268	87,417
14	A14	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	10	-	30	10	1	6	10	67
15	A15	Anak yang menjadi korban tindakan kekerasan/ yang diperlakukan salah	2	26	4	25	20	7	-	84
16	A16	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	257	250	186	210	255	185	148	1,491
17	A17	Korban Bencana Alam	1	3	2	7	5	-	1	19
18	A18	Korban bencana sosial	-	-	30	5	-	2	18	55
19	A19	Kelompok minoritas	-	-	69	8	-	-	2	79
20	A20	Pemulung	23	13	22	32	53	27	88	258
21	A21	Korban tindak kekerasan	-	1	-	1	-	11	-	13
22	A22	Orang dengan HIV Aids (ODHA)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	A23	Korban Trafficking	4	2	1	2	11	26	-	46
24	A24	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	3	1	8	29	3	19	15	78
25	A26	Pekerja Migrant Bermasalah Sosial	1	-	19	-	-	1	2	23
		JUMLAH	10,509	10,079	13,165	14,426	13,144	18,993	10,702	91,018

Sumber: Dinas Sosial Kota Sukabumi 2019

Menurut Dinas Sosial Kota Sukabumi, setidaknya terdapat 25 definisi operasional dan karakteristik dari masing-masing jenis PMKS. Dari ke-25 jenis PMKS, dan salah satu kategorinya adalah perempuan, yaitu Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).

Tabel 1.2
Jumlah data Wanita Rawan Sosial Ekonomi Kota Sukabumi

Tahun	Jumlah (orang)
2013	1,184
2014	1,198
2015	2,161
2016	4,770
2017	1,491

Sumber : Dinas Sosial Kota Sukabumi 2019

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa jumlah data WRSE di Kota Sukabumi mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Namun terjadi penurunan pada tahun 2017 dari data awal 2016 dengan jumlah WRSE 4.770 orang menjadi 1.491 orang dikarenakan faktor diluar program Dinsos yaitu banyaknya WRSE yang tidak menjadi kepala keluarga lagi dalam artian wanita tersebut telah menikah lagi yang menjadikan suaminya yang menjadi kepala keluarga sebagai pencari nafkah dan adapun faktor lainnya yaitu banyaknya ibu rumah tangga yang berhasil berjuang (*Survive*) dengan keadaannya mereka dengan cara mendirikan usaha mandiri dengan modal pribadi, tetapi penurunan yang terjadi masih diatas jumlah data pada tahun 2013. Dengan jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) pada tahun 2017 Sebanyak 1.491 orang, Dinas Sosial sendiri dalam melaksanakan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial memiliki 10 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang terlahir dari gabungan wanita-wanita yang mendapatkan pelatihan keterampilan usaha yang dijadikan satu menjadi sebuah kelompok dengan tujuan agar memudahkan pencapaian tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial secara efektif. Namun kenyataannya dari 10 KUBE yang ada hanya ada 2 KUBE saja yang masih berjalan hingga saat ini. Serta tidak adanya tindak lanjut dari Dinas Sosial sendiri sebagai pelaksana program untuk menindak lanjuti 8 KUBE yang tidak berjalan dengan seharusnya. Dan dalam pelaksanaan program pelatihan keterampilan usahanya pun dinas sosial hanya memiliki kuota peserta hanya 100 KK setiap tahunnya, karena kurangnya dana dari pihak pemerintah sehingga belum bisa mencukupi semua kegiatan didalam program.

Tabel 1.3
Data KUBE

No	Nama KUBE	alamat
1	Melati	Kabandungan RT 01/RW 06
2	Anggrek	Kabandungan RT 06/RW 06
3	Dahlia	Kabandungan RT 03/RW 06
4	Wijaya Kusuma	Kelurahan Selabatu RW 09
5	Cempaka Sari	Karang tengah
6	Putra Mandiri	Subangjaya RW 01
7	Adzkia	Subangjaya RW 08
8	Al Buchori	Babakan Bandung Subang jaya
9	As Syfa	Babakan Bandung Subang jaya
10	Mawar	Kp. Sukasirna RT 05/RW 07

Sumber: Dinas Sosial Kota Sukabumi 2019

Dari tabel diatas ada total 10 KUBE yang dibentuk Dinas Sosial pada Tahun 2017, namun yang masih aktif dan produktif hanya 2 KUBE saja yaitu KUBE yaitu KUBE Al Buchori dan As Syfa.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti menemukan beberapa fenomena masalah diantaranya :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dalam upaya pemberdayaan WRSE Dinas Sosial melakukan program pelatihan vokasional atau pelatihan pangan untuk WRSE, namun tujuan dan kebijakan pada pelaksanaan pelatihannya belum berjalan secara optimal dan tidak rutin. Dalam pelaksanaan program pelatihan pangan yang dilakukan Dinas Sosial pada tahun 2018 program pelatihan ini tidak dilaksanakan yang disebabkan oleh adanya pengurangan dana dari Pemerintah Provinsi karena sebelumnya pelatihan ini selalu rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Dan pada 2017 pemberdayaan WRSE dilakukan langsung pada tahap pemberian stimulan modal tanpa

mengadakan pelatihan vokasional terlebih dahulu seperti apa yang disebutkan di Peraturan Daerah Provinsi Nomor 10 Tahun 2012.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia pada pelaksanaan program kebijakan pemberdayaan WRSE sudah dapat dikatakan cukup baik karena Dinas Sosial memiliki relawan yang membantu dalam pelaksanaan semua program PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yaitu TKSK (Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan). permasalahan yang ada pada dimensi sumber daya ini adalah sumber daya finansial yang belum mencukupi seluruh kegiatan dalam upaya pemberdayaan WRSE yang ada di Kota Sukabumi, yang menjadi permasalahan yang terjadi dilapangan yaitu dengan jumlah peserta pelatihan paling banyak 100 KK setiap tahunnya dengan jumlah WRSE yang tercatat ada 1.491 orang di Kota Sukabumi program tersebut sangatlah tidak efektif.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Kurang tegasnya sikap pelaksana yaitu Dinas Sosial dalam pemberian tindak lanjut terhadap KUBE yang tidak berjalan karena seharusnya KUBE yang telah melakukan usaha secara mandiri namun mengalami kegagalan pada usahanya harus ditindak lanjuti dengan cara diberikan pendampingan lebih lanjut dan evaluasi KUBE namun kenyataannya tidak ada pemberian pendampingan tersebut hanya dibiarkan begitu saja karena koordinasi antara pihak Dinas Sosial dan TKSK yang kurang berjalan dengan baik.

4. Sikap atau kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana

Sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kegiatannya masih kurang optimal. Dinas Sosial yang menjadi Implementator belum memahami betul tentang kebijakan pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), hal ini dilihat dari sikap acuh pelaksana dilapangan yang tidak bekerja dengan sepenuh hati serta hanya melaksanakan kewajibannya sesuai arahan tanpa ada inisiatif pribadi untuk mensukseskan program kegiatan yang menjadikan banyaknya KUBE yang kurang berkembang.

5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi antara pelaksana dan organisasi yaitu Dinsos dan KUBE harus berjalan dengan baik agar tujuan yang telah ditetapkan dapat berhasil. Namun kenyataannya komunikasi antara Dinsos dan KUBE tidak berjalan dengan baik karena dari 10 KUBE yang dihasilkan hanya 2 KUBE saja yang masih aktif hingga saat ini. karena belum optimalnya Dinsos sebagai agen pelaksana dalam melakukan komunikasi terkait perkembangan KUBE dilapangan, serta kurangnya tanggung jawab dari anggota KUBE. Hal ini dikarenakan banyaknya tugas yang dimiliki Dinsos yang mengakibatkan pihak Dinsos harus melimpahkan tugas kepada relawan yaitu TKSK, sehingga terjadilah tumpang tindih pekerjaan dan tanggung jawab.

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Skripsi dengan judul : **“Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Sukabumi (Studi Kasus Wanita Rawan Sosial Ekonomi).”**

1.2 Fokus Masalah dan Pertanyaan Pokok Penelitian

1.2.1 Fokus Masalah

Fokus masalah dari penelitian ini mengenai implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Sukabumi (studi kasus pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)).

1.2.2 Pertanyaan Pokok Penelitian

Bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial (studi kasus pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)) di Kota Sukabumi.

1.3 Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial (studi kasus pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)) di Kota Sukabumi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari 2 aspek yaitu aspek teoritis dan aspek praktis. Aspek-aspek tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1.4.1 Aspek Teoritis

Secara teoritis merupakan pengembangan keilmuan yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan tentang Ilmu Administrasi Publik khususnya mengenai implementasi kebijakan publik.

1.4.2 Aspek Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta kontribusi positif bagi Dinas Sosial Kota Sukabumi. Khususnya dalam bidang pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).